

Napi Asal Turki Kabur dari LP Nusakambangan

CILACAP (IM) - Petugas gabungan dari berbagai instansi kini tengah memburu seorang napi Lembaga Pemasyarakatan Besi, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang dilaporkan kabur dari penjara.

"Kami bekerja sama dengan Kepolisian Resor Cilacap untuk melakukan pencarian. Kami juga membentuk tim internal, Kanwil Kemenkumham ikut terlibat, menangani, memantau, dan memberi panduan penanganan," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah Molyanto saat dihubungi dari Cilacap, Jumat (1/7).

Pihaknya belum mengetahui secara pasti kronologi kaburnya terpidana kasus narkoba atas nama Saman Hasan alias Messi, warga negara Turki itu.

Dia mengatakan Saman diketahui tidak berada di dalam Lapas Besi sejak Kamis (30/7), pukul 16.00 WIB, atau saat apel sore. "Kronologinya belum diketahui secara pasti. Hari ini, tim kami akan turun," katanya.

Kepala Lapas Besi Eddy Teguh Widodo belum bisa dikonfirmasi terkait dengan kronologi kaburnya napi atas nama Saman Hasan alias Messi karena sinyal telepon seluler sulit menjangkau wilayah Nusakambangan.

Informasi yang dihimpun, Saman Hasan alias Messi merupakan terpidana kasus narkoba dengan vonis 12 tahun penjara dan masa hukuman yang harus dijalani masih tersisa delapan bulan.

Oleh karena itu, Saman dipekerjakan oleh pihak Lapas Besi sebagai tamping (tahanan pendamping) sehingga bisa beraktivitas di luar penjara sejak apel pagi dan kembali masuk saat apel sore.

Saman diduga kabur dari Lapas Besi dengan membawa sepeda motor ke arah Kampung Laut.

Dugaan tersebut muncul karena sepeda motor yang dibawa kabur Saman ditemukan di sekitar Lengkon, Kampung Laut.

Pengejaran terhadap Saman Hasan tidak hanya melibatkan petugas Lapas Besi tetapi juga dari lapas lainnya di Pulau Nusakambangan serta Polres Cilacap dan TNI. **han**

Menhan: Satelit Militer Akan Diluncurkan 2019

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa satelit komunikasi militer Indonesia yang rencananya diluncurkan pada 2019 bersifat rahasia.

"Tidak seperti satelit lain yang bisa digunakan untuk umum atau perusahaan, di mana-mana kan satelit militer itu rahasia," ujar menhan usai acara pelepasan mudik bagi personel Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat (1/7).

Sebelumnya, Komisi I DPR telah menyetujui pengajuan anggaran oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk membeli satelit komunikasi militer dari Airbus Defence and Space, dalam program pengadaan senilai 849,3 juta dolar Amerika Serikat.

Jika satelit komunikasi militer Indonesia beroperasi, semua komunikasi TNI akan dilakukan memakai satelit militer ini.

Laman IHNS James, edisi Kamis, menyatakan, persetujuan Komisi I DPR itu terjadi pada Senin lalu (27/6). Satelit komunikasi militer Indonesia itu akan beroperasi pada frekuensi L-Band. Spesifikasi dan karakteristik satelit itu juga akan dikembangkan dan disesuaikan dengan keperluan operator dan institusi Indonesia.

Setelah diluncurkan, satelit komunikasi militer Indonesia itu akan dialokasikan pada koordinat 123 Bujur Timur, sebagaimana jatah penempatan satelit bagi Indonesia oleh Uni Telekomunikasi Internasional.

Koordinat itu sebelumnya ditempati satelit Garuda-1 yang dimiliki Asia Cellular Satellite, yang telah digeser karena sejumlah ketidakberesan sistem.

Adapun pembiayaan satelit militer Indonesia itu akan berlangsung dalam skema tahun jamak selama lima tahun. **han**

KPK Diminta Perbanyak OTT Aparat dari Lembaga Peradilan

Setelah diperiksa 1x24 jam, KPK menyematkan status tersangka kepada Panitera Pengganti PN Jakpus, Santoso dan seorang pengacara RAW serta seorang stafnya AY. RAW dan AY adalah pemberi suap.

hubungi, Jumat (1/7).

Emerson mengatakan, dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pengadilan menunjukkan perlunya langkah pemberantasan yang nyata.

Lembaga peradilan, sebagai ujung tombak sekaligus benteng terakhir bagi orang-orang yang mencari keadilan harus diperkuat dengan cara membasmi mafia hukum. "Sebagai ujung tombak dan benteng keadilan, lembaga peradilan harus diperkuat. Langkah KPK sudah tepat," katanya.

Menurut dia, upaya penegakan supremasi hukum memang harus dimulai dengan memberan-

tas mafia peradilan.

Oleh sebab itu, dia juga meminta KPK lebih sering melakukan penangkapan terhadap hakim maupun pegawai pengadilan yang masih terlibat praktik suap.

"Jadi kami minta diperbanyak lagi OTT di pengadilan. Menangkap hakim korup harus jadi prioritas utama. Kalau jaksa dan polisi menyimpang, tapi hakim berintegritas maka perkara akan menjadi benar. Tapi kalau lembaga peradilan menyimpang tentu hasilnya akan menyimpang," pungkasnya.

Sedangkan Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Fariyah menilai, kembali ditangkannya oknum lembaga peradilan terkait kasus korupsi menunjukkan bahwa sumber daya manusianya tidak berkompeten.

Menurutnya, hal ini terjadi karena sistem perekrutan dan mutasi pegawai tidak dilakukan dengan tepat. "Korupsi terjadi karena sistemnya yang kurang bagus. Ada yang salah dalam sistem promosi dan mutasi di Mahkamah Agung," ujar Liza, saat dihubungi, Jumat (1/7).

Penangkapan Santoso hanya berjarak dua bulan sejak panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution, ditangkap KPK karena kasus suap. Menurut Liza, efek jera terhadap penangkapan dan pemenjaraan bersifat relatif.

Sumber daya manusia yang lemah, membuat penangkapan tidak lagi dipandang sebagai hal yang menakutkan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Liza mengatakan, yang diperlukan saat

ini adalah perbaikan dalam sistem mutasi dan promosi.

Sebagai informasi, usai pemeriksaan selama 1x24 jam, KPK menyematkan status tersangka kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Santoso. Selain Santoso, dua orang lainnya, yakni seorang pengacara RAW serta seorang stafnya AY, juga menjadi tersangka. RAW dan AY merupakan kuasa hukum dari kantor pengacara WK.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, RAW merupakan pengacara perusahaan PT KTP yang sedang berperkara perdata di PN Jakarta Pusat. PT KTP digugat PT MMS."Siang hari (sebelum penangkapan), tanggal 30 Juni, majelis hakim memutuskan memenangkan pihak tergugat PT KTP, dengan pertimbangan gugatan tidak dapat diterima," kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat (1/7).

Diduga RAW menyuap Santoso melalui stafnya, AW. KPK menemukan uang senilai 25.000 dolar dan 3.000 dolar dalam sebuah amplop dari tangan Santoso yang ditangkap ketika sedang menumpang ojek.

KPK juga mengamankan B, seorang sopir ojek. "B masih dalam pemeriksaan, kalau sudah selesai akan segera dipulangkan.

Sebagai penerima suap Santoso dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 11 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara RAW dan AY, yang diduga pemberi suap, disangkakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP. **han**

JAKARTA (IM) - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai cukup maksimal dengan sering melakukan operasi tangkap

tangan. Emerson menilai, langkah KPK yang memantau lembaga peradilan sudah tepat.

"Langkah KPK sudah benar yang disasar adalah pengadilan karena pengadilan sebagai benteng atau ujung tombak keadilan," ujar Emerson saat di-



PIMPINAN MPR GELAR BAZAR DAGING MURAH
Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kiri) dan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (kiri) melayani pembeli saat bazar daging sapi beku di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/1). Bazar tersebut diselenggarakan untuk berpartisipasi membantu pemerintah menekan harga daging yang masih tinggi. **IM/WIDI**

Sekjen PKB Ngaku Tak Tahu Dapat Kiriman Parsel dari BPK

JAKARTA (IM) - Anggota DPR yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengaku tak mengetahui dapat kiriman parsel Lebaran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya sama sekali tidak tahu menahu soal adanya parsel itu yang kabarnya ditujukan ke saya," kata Karding di Jakarta, Jumat (1/7).

Hal itu disampaikan Karding ketika diminta tanggapan soal foto yang beredar di media sosial soal parsel Lebaran yang ditujukan kepadanya. Parsel itu dilengkapi surat dengan kop BPK.

Karding mengaku baru

mengetahui berita itu dari para wartawan terkait foto parsel tersebut. Jika benar, ia mengucapkan terima kasih, tetapi tidak bisa menerima parsel tersebut.

Saya mengucapkan terima kasih. Tapi sesuai dengan aturan maka saya tidak bisa menerima pemberian parsel dari pihak manapun. Saya pejabat publik sehingga wajib hukumnya menghindari pemberian-pemberian parsel seperti itu," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Meski demikian, Karding merasa tidak ada hubungan dengan BPK. Pasalnya, ia berada di Komisi III yang tidak bermitra dengan BPK.

"Sehingga tidak ada hubungannya dengan BPK," katanya.

Selain itu, kata Karding, alamat tujuan pengiriman parsel juga keliru. Sebab, dia tidak tinggal di Permata Hijau. "Saya sudah sejak tahun 2014 bertempat tinggal di Perumahan DPR di Kalibata," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan, secara institusi, BPK tidak pernah mengirimkan parsel dan mencetak kartu ucapan tersebut kepada siapapun.

"Kami tidak tahu menahu soal itu. Yang jelas secara institusi BPK tidak pernah melakukan hal tersebut," kata Yudi saat dihubungi. **han**

Ruang Kerja Santoso di PN Jakpus Disegel KPK

JAKARTA (IM) - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pontas Efendy menyesuaikan kembali ditangkannya panitera PN Jakarta Pusat dalam operasi tangkap tangan oleh KPK.

"Sebagai pimpinan tentu mesti bisa merasakan ini menjadi sebuah perasaan yang membuat prihatin. Meskipun saya sendiri sebagai orang yang baru (di PN Jakpus)," kata Pontas, di PN Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat (1/7).

Pontas mengatakan, pada satu bulan kepemimpinannya, dirinya sudah memperbaiki beberapa regulasi untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum. Salah satunya, memperketat tamu yang ingin bertemu hakim, panitera maupun pegawai PN.

"Termasuk di belakangmu ini (menunjuk dua satpam yang berjaga di samping resepsionis). Ini kan untuk menghindari, mengurangi akses yang terlalu langsung dengan masyarakat. Baik untuk hakim maupun panitera dan karyawan," ujar Pontas.

Humas PN Jakarta Pusat Jamaluddin Samsir mengakui bahwa panitera Santoso, yang ditangkap KPK, sedang mengalami kesulitan kondisi ekonomi. Ia menyebutkan, gaji Santoso dipotong untuk melunasi pinjaman. Pontas pun

membenarkan informasi kondisi keuangan Santoso.

"Ini kan kami sedang belajar. kami teliti dikeman yang terkait dengan dia. Apakah kehidupannya memang seperti itu? Tapi informasi awal memang seperti itu. Kan kami harus cek, memastikan dengan mendapatkan data dari bagian keuangan," kata Pontas.

Sebelumnya, KPK menangkap Santoso, panitera pengganti PN Jakpus atas dugaan menerima suap untuk mengurus perkara perdata. Selain menangkap Santoso, penyidik KPK juga menangkap dua orang lain yang diduga berperan sebagai pemberi suap.

Sebelum ditangkap, Santoso masih bekerja seperti biasa di PN Jakarta Pusat. Ia ditangkap setelah pulang kerja. Berdasarkan informasi, penyidik KPK menyita uang sekitar 30.000 dolar Singapura.

Setelah menangkap tiga orang itu, penyidik KPK langsung menyegel ruang kerja Santoso di lantai empat Gedung PN Jakarta Pusat.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap panitera pengganti di PN Jakarta Pusat itu. Namun, dia belum bersedia memercini terkait dengan kasus apa suap tersebut. **mar**

Putu Terjaring OTT KPK, SBY Kumpulkan Elit PD

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung mengumpulkan elit partai di Cikeas, Bogor saat pembaritan operasi tangkap tangan (OTT) kadernya, I Putu Suardianta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui media.

Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto. "Betul," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (1/7).

Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, SBY memberikan

pengarahan ke seluruh anggota dewan di setiap daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk terhindar dari korupsi. "Diberikan pengarahan seluruh anggota dewan dapilnya masing-masing," tukas Agus.

Presiden ke-6 Indonesia itu juga menurut Agus menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya kader partai ke praktik rasuah. "Tentunya prihatin kok masih ada kader kita, namun kami tetap menghargai KPK. Biarkan KPK menangani tuntas, transparan, dan akuntabel," tandasnya. **mei**



MUDIK BARENG PKB
Anggota DPR dari Fraksi PKB Hj Ida Fauziah melepas bus rombongan mudik gratis di Jakarta, Jumat (1/7). DPP KPK kembali memfasilitasi ribuan umat muslim yang hendak bersilaturahmi ke kampung halamannya melalui program Mudik Bareng PKB. **IM/WIDI**

PT ARGO PANTES
INTEGRATED TEXTILE INDUSTRY
PT ARGO PANTES Tbk.
Berkedudukan di Jakarta

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Luar Biasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 29 Juli 2016
Jam : 10.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Training PT. Argo Pantas Tbk., Jl. M.H Thamrin KM. 4 Cikokol Tangerang.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut :
Dengan Agenda Rapat sbb :

- Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar Perseroan.
Penjelasan : Modal Dasar Perseroan meningkat menjadi Rp 671.114.900.000,- (enam ratus tujuh puluh satu milyar seratus empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Persetujuan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas).
Penjelasan : Perseroan bermaksud melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Persetujuan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD sebesar maksimum 1.006.672.350 lembar saham.
- Persetujuan Perubahan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan : Perubahan Pasal 15 ayat 3. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjangkakan sebagian besar kekayaan bersih dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, kepada lembaga keuangan (termasuk bank) dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- Persetujuan penjaminan aset Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dari institusi keuangan baik secara langsung maupun melalui perusahaan afiliasi Perseroan yaitu PT ARGO MANUNGAL TRIASTA.
Penjelasan : Perseroan meminjamkan Aset berupa sertifikat Hak Guna Bangunan No.15 atas nama PT. Argo Pantas yang terletak di desa Gandamekar, Cibitung Bekasi kepada perusahaan afiliasi PT. Argo Manunggal Triasta untuk dijaminkan ke lembaga keuangan (termasuk bank). PT. Argo Manunggal Triasta meminjamkan plafon LC yang dimilikinya untuk digunakan oleh Perseroan, kecuali fasilitas kredit dari PT. Bank ICBC Indonesia.
- Persetujuan pelaporan aset Perseroan yaitu mesin-mesin yang berlokasi di Desa Gandamekar Cibitung, Bekasi.
Penjelasan : Aset perseroan yang dipes adalah mesin-mesin yang berlokasi di desa Gandamekar, Cibitung, Bekasi kepada afiliasi perseroan yaitu PT. Lawe Adiprasta Spinning Mills.

Catatan :

- Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT EDI Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditunjukkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, PT. Argo Pantas Tbk. di Jl.M.H. Thamrin KM. 4, Cikokol, Tangerang 15117, Banten, Indonesia. Telepon: (62-21) 55753838 Faksimil: (62-21) 55773999 atau di kantor BAE Perseroan, PT. EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350, Telepon: (62-21) 6505829. Faksimil: (62-21) 6505987.
- Semua surat kuasa mohon dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016.
- Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
- Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bahan-bahan Rapat dapat diakses melalui website Perseroan (www.argo.pantas.com) sejak tanggal Pemanggilan ini dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kantor Perseroan jika ada permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang disampaikan kepada Perseroan pada hari dan jam kerja.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Juli 2016
PT Argo Pantas Tbk.
Direksi Perseroan

TRUBA MANUNGAL

PT TRUBA ALAM MANUNGAL ENGINEERING Tbk.
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Kedua

Merujuk pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Juni 2016, dimana RUPST Pertama tidak memenuhi persyaratan quorum kehadiran, oleh karena itu tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan. Sesuai dengan Penetapan dan Ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("RUPST Kedua") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Juli 2016
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Century Park Hotel
Jl.Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270, Indonesia
Phone : 021-5712041

Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Serta memberikan kebebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 (apabila diperlukan), serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya.
- Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/ atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
- Persetujuan atas perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Terkait Mata Acara Rapat :

- Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 1 sampai dengan 3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 04 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memutuskan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri salah seorang Pengurus.

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah :
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif : pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 1 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR").
- Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk keruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
- Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagai Penerima Kuasa.
 - Pemegangsaham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir dari badan hukum yang bersangkutan.
 - Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja terhitung sejak tanggal iklan panggilan ini sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 pada alamat sebagai berikut :

Corporate Secretary
PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
Rukan Permata Senayan Blok B.03-B.05
Jl.Tentara Pelajar, South Jakarta
Phone : (62-21)57940662 and Faksimil: (62-21) 57941360

- Formulir surat kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diserahkan pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, yang beralamat di Mayapada Tower, lantai 10, suite 2B, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12520, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat, yaitu tanggal 13 Juli 2016 pukul 16.00 WIB. Dalam hal disampaikan kepada PT Ficomindo Buana Registrar, maka surat kuasa asli harus diperlihatkan kepada petugas pendaftaran dari PT Ficomindo Buana Registrar sebelum Rapat Perseroan dimulai.

5. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Juli 2016
PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.
Director